



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28/POJK.05/2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

CONTOH FORMAT 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*):

Nama : PT/ Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar Kepemilikan.
3. Data pemegang saham atau anggota selain Pemegang Saham Pengendali.
4. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. Fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
6. Laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan.
7. Bukti sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.
8. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - a. daftar aset tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 - c. contoh perjanjian pembiayaan;
 - d. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
9. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

- a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.
10. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing.
 11. Dokumen penggunaan akad yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
 12. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:
 - a. administrasi dan pembukuan;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan
 - d. penerapan prinsip mengenal nasabah.
 13. Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (P4MN).
 14. Pedoman tata kelola perusahaan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 2 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada PT/Koperasi*), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan pembiayaan/pembiayaan syariah*) pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. daftar perjanjian kegiatan usaha pembiayaan/Pembiayaan Syariah*) yang telah dilakukan;
2. fotokopi perjanjian kegiatan usaha pembiayaan/Pembiayaan Syariah*) yang telah dilakukan; dan
3. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 3 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Unit Usaha Syariah:

Nama : PT/ Koperasi*)
Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :
Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 - a. salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. wewenang dan tanggung jawab DPS,
disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
2. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS;
3. surat keputusan Direksi Perusahaan Pembiayaan yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
4. data pimpinan UUS, meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
 - d. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain; dan
 - e. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;

5. data DPS, meliputi:

- a. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi DPS;
- b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan DPS;

6. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan;

7. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah;

8. rencana kerja UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:

- a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
- b. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
- c. sistem dan prosedur kerja;
- d. jumlah dan susunan personalia, dan
- e. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 4 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal mengenai pemberian izin pembukaan Unit Usaha Syariah kepada PT /Koperasi*), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan pembiayaan syariah pada Unit Usaha Syariah pada tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. daftar perjanjian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan; dan
2. fotokopi perjanjian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 5 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG UNIT SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah dengan alamat

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. data pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah, meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - b. daftar riwayat hidup;
2. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah;
3. data alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan
4. rencana kerja Kantor Cabang Unit Syariah yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 - a. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 - b. sistem dan prosedur kerja;
 - c. struktur organisasi; dan
 - d. jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 6 LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR CABANG
UNIT SYARIAH**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bersama ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang Unit Syariah kami di
..... telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama :
Telepon :
Alamat baru :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen bukti
kepemilikan atau penguasaan gedung.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*),
kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 7 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG UNIT SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah yang beralamat di dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang Unit Syariah;
2. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
3. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 8 PELAPORAN PELAKSANAAN PENUTUPAN UNIT USAHA SYARIAH

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami melaporkan pelaksanaan penutupan Unit Usaha Syariah yang beralamat di dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. bukti pemberitahuan rencana penutupan UUS kepada Debitur;
2. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Debitur; dan
3. bukti penyelesaian keberatan dari Debitur, apabila terdapat keberatan dari Debitur.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 9 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Kota/Kabupaten dan Provinsi	Alamat, No. Telepon, dan No. Fax
1.		
dst.		

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- rencana bisnis tahunan Perusahaan yang memuat:
 - alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
 - sumber pendanaan;
 - target pembiayaan; dan
 - proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan.
- rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang memuat:
 - target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 - sistem dan prosedur kerja;
 - struktur organisasi;
 - proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 bulan; dan
 - analisis potensi pasar dan persaingan usaha.
- bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)
.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 10 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR CABANG

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)

Alamat :

melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Kantor Cabang	Alamat (termasuk nama Kota/Kabupaten dan Provinsi)	Alasan Penutupan
1.			
dst.			

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang;
2. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
3. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Debitur.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*)
kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 11 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)

Alamat :

melaporkan pembukaan Kantor selain Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Nama Kantor	Alamat (termasuk nama Kota/Kabupaten dan Provinsi)	Fungsi Kantor	Kantor Cabang yang menaungi
1.				
dst.				

Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN STATUS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG MENJADI KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:
Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut:

No.	Nama Kantor Selain Kantor Cabang	Alamat	Nama Kantor Cabang	Alamat (Termasuk Tlp dan Fax)
1.				
dst.				

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- rencana bisnis tahunan Perusahaan yang memuat:
 - alamat lengkap Kantor Cabang yang akan dibuka;
 - sumber pendanaan;
 - target pembiayaan; dan
 - proyeksi keuangan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan.
- rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:
 - target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 - sistem dan prosedur kerja;
 - struktur organisasi;
 - proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - analisis potensi pasar dan persaingan usaha.
- jumlah dan susunan personalia, disertai dengan daftar riwayat hidup dan nama calon kepala cabang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)
.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 13 LAPORAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (Sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti pengesahan/persetujuan*) dari instansi berwenang, yang pengesahan/persetujuannya*) kami terima pada tanggal; dan
2. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk menetapkan perubahan Keputusan OJK mengenai izin usaha PT/Koperasi*)

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 14 LAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:
Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai nama, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	Nama Lama	Nama Baru

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal **);
2. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar***); dan
3. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk menetapkan perubahan keputusan OJK izin usaha dari PT/Koperasi*) kepada PT/Koperasi*)

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu
**) persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseoran terbatas
***) persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi

**CONTOH FORMAT 15 LAPORAN PENGURANGAN MODAL DITEMPATKAN
DAN DISETOR PERUSAHAAN**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai pengurangan modal, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.Modal dasar		
2.Modal disetor dan modal ditempatkan		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

Adapun alasan pengurangan modal tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 16 LAPORAN PERUBAHAN STATUS PERSEROAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT.....
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai status perusahaan perseroan terbatas tertutup/terbuka*), sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (Sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 17 LAPORAN PENAMBAHAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PERUSAHAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai penambahan modal, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas:		
1. Modal dasar		
2. Modal ditempatkan dan disetor		
Bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi:		
1. Simpanan pokok		
2. Simpanan Wajib		
3. Hibah		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut**):

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, yang surat penerimaan pemberituannya kami terima pada tanggal**);
- bukti penambahan modal yaitu;
 - fotokopi bukti setoran modal pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai***); atau
 - laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan pinjaman subordinasi dan/atau saldo laba bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas**);

3. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai***);
4. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi****); dan
5. rencana bisnis (*business plan*) dan langkah-langkah Perusahaan dalam penggunaan penambahan Modal Disetor.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) diisi atau disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas

***) persyaratan ini disampaikan jika terjadi penambahan modal disetor berbentuk uang

****) persyaratan ini disampaikan jika pemegang saham yang berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi melakukan penambahan modal

CONTOH FORMAT 18 LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris*) yaitu:

Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan
Komisaris			
Direktur			

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- 1. akta risalah rapat anggota**);
- 2. perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, yang surat penerimaan pemberitahuannya kami terima pada tanggal***);

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu
**) persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi
***) persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas

CONTOH FORMAT 19 LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT.....
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai pemegang saham, sebagai berikut:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti surat pencatatan dari instansi berwenang, yang surat penerimaan pemberitahuannya kami terima pada tanggal
2. akta pemindahan hak atas saham, *);
3. data pemegang saham, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan
4. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan **).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT

.....

*) persyaratan ini disampaikan jika terjadi pemindahan hak atas saham
**) persyaratan ini disampaikan jika terjadi jual beli saham

**CONTOH FORMAT 20 LAPORAN PERUBAHAN SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan mengenai susunan dan kedudukan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- 1. bukti lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas Syariah; dan
- 2. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH FORMAT 21 LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT,
KANTOR CABANG, ATAU KANTOR SELAIN KANTOR CABANG**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bersama ini kami laporkan bahwa Kantor Pusat/Cabang/Kantor Selain Kantor Cabang*) kami di telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama	:
Telepon	:
Alamat baru**)	:
Telepon	:
Tanggal pemindahan	:

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor

CONTOH FORMAT 22 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

Menyampaikan permohonan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan PT/Koperasi*) menjadi PT/Koperasi*) yang merupakan Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. rencana akta risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota*)
2. rencana akta Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan*);
3. rencana daftar kepemilikan, bagi Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan/Peleburan*);
4. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan.
5. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
6. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan/Peleburan*);
7. data pemegang saham;
8. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal dari pinjaman,kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan, bagi Perusahaan yang akan melakukan Pengambilalihan; dan
9. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk memberikan persetujuan atas Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan*) tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ /Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 23 LAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) tanggal telah dilakukan Penggabungan/Peleburan*) antara PT/Koperasi*) dan PT/Koperasi*)..... menjadi PT/Koperasi*) yang merupakan Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. akta risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota*);
2. akta Penggabungan/Peleburan*) yang telah disetujui/dicatat /disahkan*) oleh instansi berwenang, yang persetujuan/pencatatan/pengesahannya*) kami terima pada tanggal;
3. daftar kepemilikan pemegang saham/anggota; dan
4. data pemegang saham/daftar anggota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu*) untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT/Koperasi*) yang merupakan hasil Peleburan antara PT/Koperasi*) dan PT/Koperasi*)**)

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) pilihan sesuai dengan bentuk badan hukum

CONTOH FORMAT 24 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN HASIL PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

yang merupakan Perusahaan Pembiayaan hasil Peleburan/Penggabungan*) sebagaimana disampaikan dalam surat kami sebelumnya Nomor..... tanggal....., mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang hasil Peleburan/Penggabungan *) sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Kantor Cabang terdahulu	Alamat (termasuk nama Kota/Kabupaten, Provinsi, No. Telp dan Fax)
1.		
2.		
dst.		

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri; dan
2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 25 PERMOHONAN IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BARU HASIL PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*) hasil pemisahan murni yang kami terima dari PT.....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/daftar anggota*) bagi pemegang saham pengendali.
3. Data pemegang saham atau anggota selain pemegang saham pengendali.
4. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
6. Laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan.
7. Bukti sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.
8. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - a. daftar aset tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 - c. contoh perjanjian pembiayaan;
 - d. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
9. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi

komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional

10. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing.
11. Dokumen penggunaan akad yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
12. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:
 - a. administrasi dan pembukuan;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan
 - d. penerapan prinsip mengenal nasabah
13. Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (P4MN).
14. Pedoman tata kelola perusahaan.
15. Akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan.
16. Akta pemisahan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 26 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN HASIL PEMISAHAN MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

yang merupakan Perusahaan Pembiayaan hasil Pemisahan sebagaimana disampaikan dalam surat kami sebelumnya Nomor..... tanggal....., mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang hasil Pemisahan sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Kantor Cabang terdahulu	Alamat (termasuk nama Kota/Kabupaten, Provinsi, No. Telp dan Fax)
1.		
2.		
dst.		

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan murni; dan
2. bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 27 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Poduk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pemisahan tidak murni PT..... kepada PT dan PT

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. rancangan akta Pemisahan;
2. rancangan akta pendirian Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*) yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; dan
3. proyeksi laporan posisi keuangan Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*) yang melakukan Pemisahan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 28 PELAPORAN PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT.....

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pada tanggal telah dilakukan pemisahan tidak murni PT..... kepada PT dan PT....., dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan;
2. akta Pemisahan; dan
3. perubahan anggaran dasar yang disahkan atau disetujui disertai dengan bukti persetujuan/surat penerimaan pemberitahuan*) oleh instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, yang persetujuan/surat penerimaan pemberituannya*) kami terima pada tanggal**).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 29 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BARU HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*):

Nama : PT/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi*) termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/daftar anggota*) bagi pemegang saham pengendali.
3. Data pemegang saham atau anggota selain pemegang saham pengendali.
4. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.
6. Laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan.
7. Bukti sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha.
8. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - a. daftar aset tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
 - c. contoh perjanjian pembiayaan;
 - d. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).
9. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

- a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional
10. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing.
 11. Dokumen penggunaan akad yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
 12. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:
 - a. administrasi dan pembukuan;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan
 - d. penerapan prinsip mengenal nasabah
 13. Pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (P4MN).
 14. Pedoman tata kelola perusahaan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 30 PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN HASIL PEMISAHAN TIDAK MURNI

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi*)
Alamat :

yang merupakan Perusahaan Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan Syariah*)
hasil Pemisahan sebagaimana disampaikan dalam surat kami sebelumnya
Nomor..... tanggal....., mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin
pembukaan Kantor Cabang hasil Pemisahan sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Kantor Cabang terdahulu	Alamat (termasuk nama Kota/Kabupaten, Provinsi, No. Telp dan Fax)
1.		
2.		
dst.		

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

1. izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Pemisahan tidak murni; dan
2. bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi *)

.....

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 31 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN KONVERSI

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah:

Nama : PT/ Koperasi*)

Alamat :

Kota

Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan.
2. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi, Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali yang masih berlaku.
3. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS.
4. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi.
5. Daftar pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, dilampiri dengan bukti menunjukkan keahlian dan/atau pengalaman dimaksud.
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - a. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - b. rencana penyaluran pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi

PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

*) coret yang tidak perlu

.....

CONTOH FORMAT 33 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami menyampaikan permohonan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan, bagi:

Nama : PT/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan
2. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan.

Demikian permohonan kami yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 34 LAPORAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
u.p Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, bersama ini kami menyampaikan laporan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan, bagi:

Nama : PT/ Koperasi*)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota*); dan
2. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/ Koperasi*)

.....

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

MULIAMAN D. HADAD

Ttd.

Tini Kustini